



Relasi Kekuasaan dalam Penentuan Prioritas Infrastruktur Jalan dan Tata Kelola Nagari di Kabupaten Solok

Wike Putri Meilia^{1*}, Nora Eka Putri¹, Lince Magriasti¹, Angga Putra Tri Rezeki¹
Hendri Gunawan¹, Ega Febrian²

¹ Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Padang,
Sumatera Barat, Indonesia, 25132

² Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas,
Kampus Limau Manis, Padang, Sumatera Barat, Indonesia, 25163

*Penulis Korespondensi: meiliawikeputri@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze power relations in the prioritization of road infrastructure and village governance in Solok Regency. The study employs a descriptive qualitative approach based on document analysis and targeted literature review. Primary data is sourced from Solok Regency in Figures 2026, specifically regarding land area, the number of sub-districts, the number of villages and hamlets, the condition of regency roads, poverty, the Human Development Index, the Gini Coefficient, and the number of members of the Regional People's Representative Council. Michel Foucault's theory of power relations was used to analyze how power operates through actors, data, planning documents, budgets, deliberative forums, and administrative practices in regional development. The research findings indicate that the prioritization of road infrastructure is not merely technical but also constitutes an arena of power relations among the local government, the Regional People's Representative Council, Regional Government Agencies, village governments, local elites, the community, and economic actors. The fact that severely damaged roads are longer than roads in good condition indicates challenges in connectivity and spatial inequality. Furthermore, the nagari serves as a vital space for community participation, but it also has the potential to become an arena for local elite domination if governance is not transparent. This study emphasizes that sustainable development in Solok Regency requires data-driven, transparent, participatory, collaborative, and regionally equitable governance.*

Keywords: *power relations; road infrastructure; nagari governance; sustainable development*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis relasi kekuasaan dalam penentuan prioritas infrastruktur jalan dan tata kelola nagari di Kabupaten Solok. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi dokumen dan literatur terarah. Data utama bersumber dari Kabupaten Solok Dalam Angka 2026, terutama mengenai luas wilayah, jumlah kecamatan, jumlah nagari dan jorong, kondisi jalan kabupaten, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Gini Ratio, serta jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Teori relasi kekuasaan Michel Foucault digunakan untuk membaca bagaimana kekuasaan bekerja melalui aktor, data, dokumen perencanaan, anggaran, forum musyawarah, dan praktik administratif pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan prioritas infrastruktur jalan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan arena relasi kekuasaan antara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, pemerintah nagari, elite lokal, masyarakat, dan pelaku ekonomi. Kondisi jalan rusak berat yang lebih panjang dibandingkan jalan dalam kondisi baik menunjukkan adanya tantangan konektivitas dan ketimpangan spasial. Selain itu, nagari menjadi ruang penting partisipasi masyarakat, tetapi juga

berpotensi menjadi arena dominasi elite lokal apabila tata kelola tidak transparan. Penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok membutuhkan tata kelola berbasis data, transparan, partisipatif, kolaboratif, dan berkeadilan wilayah.

Kata kunci: relasi kekuasaan; infrastruktur jalan; tata kelola nagari; pembangunan berkelanjutan

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah tidak dapat dipahami hanya sebagai proses teknokratis yang berkaitan dengan penyusunan program, alokasi anggaran, dan pelaksanaan kegiatan fisik. Dalam praktiknya, pembangunan daerah merupakan arena relasi kekuasaan yang mempertemukan berbagai aktor dengan kepentingan, kewenangan, sumber daya, dan kapasitas yang berbeda. Pemerintah daerah memiliki otoritas formal dalam merumuskan kebijakan pembangunan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjalankan kebijakan sektoral, sementara pemerintah nagari dan masyarakat berada pada posisi paling dekat dengan kebutuhan pembangunan di tingkat lokal. Studi tentang penataan ruang, tata kelola sumber daya alam, dan konflik pembangunan menunjukkan bahwa proses pembangunan kerap menjadi arena kuasa karena melibatkan dominasi aktor, kepentingan politik, dan ketimpangan akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan (Sholikin, 2025; Dona et al., 2025).

Pada ranah tersebut, keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh jumlah program yang dirancang, tetapi juga oleh bagaimana kekuasaan didistribusikan, dinegosiasikan, dan dikontrol dalam proses tata kelola daerah. Pembangunan jalan, perencanaan nagari, penentuan prioritas anggaran, dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak dapat dilihat sebagai kegiatan administratif yang sepenuhnya netral. Proses tersebut memperlihatkan bagaimana aktor tertentu dapat memiliki akses lebih besar terhadap informasi, forum pengambilan keputusan, dokumen perencanaan, dan sumber daya anggaran. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat, komunikasi perencanaan, dan inovasi kebijakan daerah menjadi prasyarat penting untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan (Mahlella, 2025; Yusri et al., 2025; Handini et al., 2025).

Kabupaten Solok menjadi lokus penting untuk dianalisis karena memiliki karakter wilayah yang luas, berbasis nagari, serta menghadapi tantangan pembangunan yang

beragam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (2026), Kabupaten Solok memiliki luas daratan 3.738 km², terdiri atas 14 kecamatan, 74 nagari, dan 414 jorong. Struktur wilayah seperti ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak berlangsung dalam ruang yang homogen. Setiap kecamatan dan nagari memiliki kebutuhan, akses, potensi, dan kendala yang berbeda. Dalam studi desa sebagai subjek pembangunan, penguatan kelembagaan lokal dan partisipasi warga dipandang penting agar pembangunan tidak hanya bersifat instruktif dari atas, tetapi juga berakar pada kebutuhan masyarakat setempat (Sutisna et al., 2026; Lazar et al., 2024).

Salah satu persoalan penting yang menunjukkan kompleksitas tata kelola pembangunan di Kabupaten Solok adalah kondisi infrastruktur jalan. Data Kabupaten Solok Dalam Angka 2026 menunjukkan bahwa panjang jalan kabupaten tahun 2025 mencapai 1.152,99 km. Namun, jalan dalam kondisi baik hanya 316,18 km, sedangkan jalan rusak berat mencapai 476,34 km. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan konektivitas wilayah secara merata. Studi infrastruktur menegaskan bahwa pembangunan jalan tidak hanya terkait mobilitas fisik, tetapi juga berhubungan dengan distribusi akses ekonomi, pelayanan publik, dan prioritas politik pembangunan (Zahwa & Sari, 2025; Makhya, 2026).

Studi terbaru tentang relasi kuasa memperlihatkan bahwa pembangunan dan tata kelola lokal tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara aktor formal, aktor lokal, dokumen kebijakan, dan partisipasi masyarakat. Lazar et al. (2024) menunjukkan bahwa relasi kuasa pemerintah desa dan masyarakat memengaruhi pengelolaan keuangan desa, terutama ketika partisipasi masyarakat dalam musyawarah masih terbatas. Dona et al. (2025) menunjukkan bahwa ketimpangan kekuasaan dapat memperlemah posisi masyarakat ketika berhadapan dengan aktor yang memiliki otoritas, akses, dan sumber daya lebih besar. Harahap (2026) juga menunjukkan bahwa praktik *governmentality* dapat bekerja melalui kebijakan resmi, pengetahuan teknis, dan pengaturan masyarakat. Dengan demikian, teori Foucault relevan untuk menganalisis penentuan prioritas infrastruktur jalan dan tata kelola nagari di Kabupaten Solok sebagai arena relasi kekuasaan, bukan sekadar proses administratif.

Novelty penelitian ini terletak pada analisis relasi kekuasaan dalam penentuan prioritas infrastruktur jalan dan tata kelola nagari dengan menggunakan perspektif Michel Foucault. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas relasi kuasa pada level desa, konflik sumber daya alam, tata ruang, atau pembangunan secara umum, artikel ini menempatkan infrastruktur jalan sebagai arena konkret bekerjanya kekuasaan dalam pembangunan daerah. Artikel ini juga menghubungkan data kondisi jalan, struktur nagari, peran DPRD, OPD, pemerintah nagari, elite lokal, dan masyarakat sebagai bagian dari jaringan kekuasaan yang menentukan arah pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok (Setyanto, 2025; Enala et al., 2025; Aysyah et al., 2026).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana relasi kekuasaan antaraktor memengaruhi penentuan prioritas infrastruktur jalan di Kabupaten Solok; bagaimana tata kelola nagari menjadi arena partisipasi sekaligus potensi dominasi elite lokal; dan bagaimana relasi kekuasaan dalam pembangunan jalan serta tata kelola nagari memengaruhi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis relasi kekuasaan dalam penentuan prioritas infrastruktur jalan, menjelaskan tata kelola nagari sebagai arena relasi kuasa, serta merumuskan implikasinya terhadap pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Relasi Kekuasaan Michel Foucault dalam Tata Kelola Pembangunan

Foucault dalam Lazar et al. (2024) menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui lembaga formal negara, tetapi juga melalui hubungan sosial, prosedur kelembagaan, forum musyawarah, dokumen perencanaan, mekanisme pengawasan, dan praktik administratif. Dalam tata kelola pembangunan daerah, kekuasaan tidak hanya berada pada kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi juga bekerja melalui relasi antara pemerintah nagari, Badan Musyawarah Nagari, tokoh adat, elite lokal, masyarakat, pelaku usaha, dan birokrasi teknis.

Dalam perspektif Foucault yang digunakan oleh Dona et al. (2025), ketimpangan kekuasaan muncul ketika masyarakat berhadapan dengan aktor yang memiliki otoritas,

akses, dan sumber daya lebih besar. Karena itu, data kondisi jalan, dokumen perencanaan, dokumen anggaran, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak dapat dipahami sebagai dokumen netral, tetapi sebagai instrumen yang menentukan masalah, wilayah prioritas, dan kelompok penerima manfaat pembangunan.

Konsep *governmentality* Foucault digunakan untuk membaca bagaimana kebijakan, data statistik, pengetahuan teknis, dan prosedur administratif membentuk prioritas pembangunan. Di Kabupaten Solok, hal ini tampak dalam penggunaan data kondisi jalan, kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gini Ratio, dokumen perencanaan, dan Musrenbang untuk menentukan prioritas pembangunan jalan dan tata kelola nagari. Kerangka ini sejalan dengan pentingnya regulasi, koordinasi, partisipasi, dan pengawasan lintas aktor dalam pembangunan berkelanjutan (Andreastuti & Ayu, 2025; Daaris & Marwah, 2024). Oleh sebab itu, masyarakat nagari tidak boleh hanya diposisikan sebagai penerima program, tetapi sebagai subjek pembangunan yang berhak menyampaikan aspirasi, memengaruhi keputusan, mengawasi, dan mengevaluasi hasil pembangunan (Villadsen, 2024).

2.2 Infrastruktur Jalan sebagai Arena Relasi Kekuasaan

Infrastruktur jalan merupakan indikator penting dalam tata kelola pembangunan daerah karena berkaitan dengan mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan konektivitas ekonomi. Namun, pembangunan jalan juga menjadi arena relasi kekuasaan karena menyangkut penentuan ruas yang diperbaiki, kecamatan yang diprioritaskan, dan nagari yang memperoleh akses pembangunan. Studi politik ekonomi infrastruktur menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak dapat dilepaskan dari kepentingan aktor, distribusi sumber daya, dan keputusan negara dalam menentukan arah pembangunan (Zahwa & Sari, 2025; Makhya, 2026). Penentuan prioritas jalan tidak hanya bergantung pada tingkat kerusakan, tetapi juga pada bagaimana data dibaca, dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan, diperjuangkan dalam anggaran, dan dinegosiasikan oleh pemerintah daerah, DPRD, OPD, pemerintah nagari,

serta masyarakat. Dengan demikian, jalan bukan hanya sarana fisik penghubung wilayah, tetapi juga indikator distribusi kekuasaan dan pemerataan pembangunan.

2.3 Tata Kelola Nagari, Partisipasi, dan Elite Lokal

Nagari merupakan unit pemerintahan lokal penting di Kabupaten Solok. Dengan 74 nagari dan 414 jorong, pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan nagari dalam mengidentifikasi kebutuhan, menyusun prioritas, mengelola program, dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah kabupaten. Namun, nagari juga menjadi arena sosial-politik tempat relasi kekuasaan bekerja. Studi tentang dominasi supradesa dan dinamika aktor pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa pembangunan lokal dapat mengalami ketegangan ketika kewenangan formal, kepentingan elite, dan partisipasi warga tidak berjalan seimbang (Pantola et al., 2025; Maulana et al., 2025).

Lazar et al. (2024) menunjukkan bahwa relasi kuasa antara pemerintah desa dan masyarakat memengaruhi pengelolaan keuangan desa, terutama ketika partisipasi masyarakat dalam musyawarah masih rendah. Dalam lingkup Kabupaten Solok, Musyawarah Nagari dan Musrenbang dapat menjadi ruang demokratis apabila masyarakat memiliki akses informasi, ruang bicara, dan pengaruh dalam menentukan prioritas pembangunan. Sebaliknya, forum tersebut dapat menjadi formalitas apabila keputusan lebih banyak dikendalikan oleh elite lokal atau aktor yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya politik dan administratif. Karena itu, tata kelola nagari perlu diperkuat melalui partisipasi substantif, keterbukaan informasi, kesempatan berbicara yang setara, dan mekanisme pengawasan warga.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumen dan literatur terarah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami relasi kekuasaan dalam penentuan prioritas infrastruktur jalan dan tata kelola nagari sebagai fenomena sosial-politik yang bekerja melalui aktor, data, dokumen perencanaan, anggaran, forum partisipasi, dan praktik administratif.

Data utama bersumber dari publikasi resmi *Kabupaten Solok Dalam Angka 2026* yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok. Data yang digunakan meliputi luas wilayah, jumlah kecamatan, jumlah nagari dan jorong, kondisi jalan kabupaten,

tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gini Ratio, serta jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Data tersebut dipilih karena relevan untuk membaca struktur wilayah, kapasitas tata kelola, konektivitas infrastruktur, serta indikator sosial-ekonomi pembangunan daerah.

Selain data statistik, penelitian ini menggunakan literatur ilmiah tahun 2024–2026 yang membahas relasi kekuasaan, *governmentality*, tata kelola desa atau nagari, pembangunan infrastruktur, partisipasi masyarakat, politik anggaran, dan pembangunan berkelanjutan. Literatur tersebut digunakan untuk memperkuat analisis teoritis dan membandingkan temuan Kabupaten Solok dengan studi terbaru mengenai tata kelola pembangunan. Penggunaan data sosial-ekonomi dan komunikasi perencanaan penting untuk menilai apakah kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara adil (Setyanto, 2025; Yusri et al., 2025). Literatur tentang penataan ruang dan pembangunan infrastruktur juga digunakan untuk memperkuat pembacaan bahwa pembangunan fisik sering kali mengandung dimensi politik, kuasa, dan distribusi akses (Zahwa & Sari, 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen resmi dan literatur ilmiah yang relevan dengan tiga fokus utama, yaitu infrastruktur jalan, tata kelola nagari, dan relasi antaraktor pembangunan daerah. Analisis data dilakukan melalui empat tahap, yaitu reduksi data, kategorisasi, interpretasi teoritis, dan sintesis. Reduksi data dilakukan dengan memilih data terkait wilayah, jalan, nagari, DPRD, kemiskinan, IPM, Gini Ratio, dan aktor pembangunan. Kategorisasi dilakukan berdasarkan tema ketimpangan spasial, politik anggaran, prioritas infrastruktur jalan, tata kelola nagari, partisipasi masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Interpretasi teoritis dilakukan dengan teori relasi kekuasaan Foucault untuk membaca bagaimana kekuasaan bekerja melalui aktor, data, dokumen, anggaran, dan forum partisipasi. Sintesis dilakukan dengan menyusun model relasi kekuasaan dalam tata kelola pembangunan Kabupaten Solok.

Setiap subbagian hasil dan pembahasan disusun dengan pola data, temuan, analisis teori, dan implikasi. Data digunakan untuk menunjukkan kondisi empiris Kabupaten Solok, temuan untuk mengidentifikasi masalah utama, analisis teori untuk membaca

bekerjanya relasi kekuasaan, dan implikasi untuk menjelaskan dampaknya terhadap tata kelola pembangunan berkelanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Ketimpangan Spasial dalam Struktur Wilayah Kabupaten Solok

Data dasar wilayah menunjukkan bahwa Kabupaten Solok memiliki karakter geografis dan administratif yang kompleks. Kabupaten Solok memiliki luas wilayah 3.738 km², terdiri atas 14 kecamatan, 74 nagari, dan 414 jorong. Struktur ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah berlangsung dalam wilayah yang luas, tersebar, dan memiliki kebutuhan berbeda antarkecamatan maupun antarnagari.

Gambar 1. Infografis Analisis Administratif Kabupaten Solok (2026)



Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (2026).

Temuan utama dari data tersebut adalah adanya potensi ketimpangan spasial dalam tata kelola pembangunan. Nagari yang dekat dengan pusat pemerintahan, memiliki akses komunikasi lebih baik, atau kapasitas administratif yang kuat berpotensi lebih mudah menyampaikan kebutuhan pembangunan. Sebaliknya, nagari pinggiran atau yang memiliki keterbatasan akses dapat mengalami hambatan dalam memperjuangkan prioritas pembangunan. Studi penataan ruang menunjukkan bahwa pembangunan wilayah dapat menjadi arena kuasa ketika proses perencanaan lebih kuat dikendalikan aktor tertentu dibandingkan masyarakat terdampak (Sahetapy et al., 2026).

Dalam perspektif Foucault, kekuasaan bekerja melalui relasi sosial dan kelembagaan, bukan hanya melalui struktur formal negara. Di Kabupaten Solok, ketimpangan spasial tidak hanya menjadi persoalan geografis, tetapi juga berkaitan dengan perbedaan akses antarwilayah terhadap data, forum perencanaan, komunikasi birokrasi, dan pengambilan

keputusan pembangunan (Lazar et al., 2024). Nagari yang kuat secara administratif dan politik berpotensi lebih mudah masuk dalam agenda pembangunan, sedangkan nagari dengan kapasitas terbatas dapat tertinggal. Hal ini sejalan dengan studi relasi kuasa pengelolaan ekosistem mangrove yang menunjukkan bahwa struktur kebijakan dapat membentuk kewenangan aktor lokal dan negara (Aysyah et al., 2026).

Implikasinya, tata kelola pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok perlu diarahkan pada perencanaan berbasis kebutuhan wilayah, bukan hanya usulan administratif. Pemerintah daerah perlu memastikan nagari dengan keterbatasan akses tetap memperoleh ruang yang adil dalam perencanaan dan penganggaran agar distribusi pembangunan tidak semakin timpang.

4.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Politik Anggaran, dan Pengawasan Pembangunan Daerah

DPRD Kabupaten Solok memiliki 35 anggota dari berbagai partai politik. Data ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah eksekutif, tetapi juga oleh lembaga legislatif yang memiliki fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Dalam pembangunan jalan dan tata kelola nagari, DPRD berperan strategis karena dapat memengaruhi prioritas anggaran, mengawasi pelaksanaan pembangunan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan. Studi tentang *policy network* dan aktor administrasi publik menunjukkan bahwa kualitas kebijakan dipengaruhi oleh konfigurasi jaringan, kewenangan, dan koordinasi antaraktor (Lubis et al., 2025; Enala et al., 2025).

Temuan pentingnya adalah bahwa politik anggaran menjadi arena utama bekerjanya relasi kekuasaan dalam pembangunan daerah. Prioritas infrastruktur jalan, alokasi program nagari, dan pengawasan terhadap OPD tidak dapat dilepaskan dari relasi eksekutif-legislatif. Jika relasi tersebut berbasis data, kebutuhan wilayah, dan kepentingan publik, DPRD dapat memperkuat akuntabilitas pembangunan. Sebaliknya, apabila didominasi kepentingan politik jangka pendek, prioritas pembangunan berisiko bergeser dari kebutuhan objektif masyarakat. Dinamika politik pembangunan daerah menunjukkan bahwa program pembangunan kerap dipengaruhi oleh kepentingan aktor, desain kebijakan, dan strategi legitimasi pemerintah (Jaya et al., 2025; Sholikin, 2025).

Dalam politik anggaran daerah, program yang masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering dianggap sebagai kebutuhan yang sah, sedangkan kebutuhan masyarakat yang tidak masuk dalam dokumen anggaran berpotensi tidak terlihat dalam kebijakan. Oleh karena itu, pembahasan anggaran antara pemerintah daerah dan DPRD perlu dibaca sebagai arena relasi kekuasaan yang menentukan prioritas pembangunan. Implikasinya, DPRD perlu ditempatkan bukan hanya sebagai aktor politik, tetapi juga sebagai pengendali kualitas pembangunan berkelanjutan. Pengawasan DPRD terhadap pembangunan jalan harus diarahkan pada pemerataan konektivitas, sementara aspirasi masyarakat perlu diverifikasi dengan data teknis dan dokumen perencanaan agar pembangunan tidak terjebak pada politik representasi yang sempit.

4.3 Infrastruktur Jalan sebagai Arena Penentuan Prioritas Pembangunan

Kondisi jalan kabupaten menjadi indikator penting untuk membaca relasi kekuasaan dalam pembangunan Kabupaten Solok. Data *Kabupaten Solok Dalam Angka 2026* menunjukkan bahwa total panjang jalan kabupaten tahun 2025 mencapai 1.152,99 km. Dari jumlah tersebut, jalan dalam kondisi baik hanya 316,18 km, sedangkan jalan rusak berat mencapai 476,34 km

Gambar 2. Kondisi Jalan Kabupaten Solok Tahun 2025



Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (2026).

Temuan utama dari data tersebut adalah bahwa panjang jalan rusak berat lebih besar dibandingkan jalan dalam kondisi baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa konektivitas wilayah masih menjadi persoalan serius karena jalan rusak tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga memengaruhi akses pendidikan, kesehatan, pasar, pelayanan publik, dan distribusi hasil pertanian. Studi pembangunan infrastruktur menegaskan bahwa jalan memiliki posisi strategis dalam menghubungkan wilayah, memperkuat pelayanan dasar, dan membuka akses ekonomi masyarakat (Zahwa & Sari, 2025; Makhya, 2026).

Dalam perspektif *governmentality* Foucault sebagaimana digunakan oleh Harahap (2026), data kerusakan jalan bukan sekadar angka teknis, tetapi instrumen pengetahuan yang membentuk prioritas pembangunan. Namun, penentuan ruas jalan yang diperbaiki tidak hanya ditentukan oleh tingkat kerusakan, tetapi juga oleh kekuatan usulan, akses politik, kapasitas anggaran, dan kemampuan aktor lokal memperjuangkan kebutuhan wilayahnya. Dengan demikian, pembangunan jalan tidak hanya menjadi urusan teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), tetapi juga arena politik-administratif yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, OPD, pemerintah nagari, dan masyarakat.

Implikasinya, pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok membutuhkan mekanisme prioritas jalan yang transparan, berbasis data, dan dapat diuji publik. Skala prioritas perlu disusun berdasarkan tingkat kerusakan, jumlah penduduk terdampak, akses ke pusat layanan, konektivitas ekonomi, dan keterhubungan antarnagari agar pembangunan jalan tidak hanya menjadi proyek fisik, tetapi juga instrumen pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan spasial.

4.4 Tata Kelola Nagari, Partisipasi, dan Elite Lokal

Nagari memiliki posisi strategis dalam pembangunan Kabupaten Solok karena menjadi unit pemerintahan lokal yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan 74 nagari dan 414 jorong, pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan nagari dalam mengidentifikasi kebutuhan warga, menyusun prioritas, mengelola program, dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah kabupaten. Namun, nagari juga menjadi arena relasi kuasa antara wali nagari, perangkat nagari, Badan Musyawarah Nagari, tokoh adat, elite lokal, kelompok masyarakat, dan pemerintah kabupaten.

Temuan utama menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tata kelola nagari penting, tetapi rentan menjadi formalitas. Musyawarah nagari dapat menjadi ruang demokratis apabila warga memiliki akses informasi, memahami proses perencanaan, dan memiliki kesempatan memengaruhi keputusan. Sebaliknya, jika hanya menjadi prosedur administratif, keputusan pembangunan dapat lebih banyak dikendalikan oleh elite lokal atau aktor yang dekat dengan kekuasaan formal. Studi tentang dominasi supradesa dan dinamika politik antaraktor dalam pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa partisipasi

warga dapat melemah ketika pembangunan dikendalikan oleh struktur kekuasaan yang lebih kuat (Pantola et al., 2025; Maulana et al., 2025).

Dalam perspektif relasi kuasa, tata kelola nagari di Kabupaten Solok dapat dibaca melalui hubungan antara wali nagari, perangkat nagari, Badan Musyawarah Nagari, tokoh adat, elite lokal, masyarakat, dan pemerintah kabupaten dalam menentukan prioritas pembangunan. Lazar et al. (2024) menunjukkan bahwa relasi kuasa pemerintah desa dan masyarakat memengaruhi pengelolaan keuangan desa, terutama ketika partisipasi dalam musyawarah masih rendah. Karena itu, Musyawarah Nagari dan Musrenbang perlu diperkuat sebagai ruang partisipasi substantif, bukan sekadar formalitas. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa desentralisasi hanya bermakna apabila kelembagaan lokal dan partisipasi warga benar-benar diperkuat (Sutisna et al., 2026).

Implikasinya, Pemerintah Kabupaten Solok perlu memperkuat kualitas Musrenbang nagari, transparansi informasi anggaran, kapasitas Badan Musyawarah Nagari, serta keterlibatan kelompok masyarakat yang kurang terwakili. Partisipasi tidak cukup diukur dari kehadiran dalam forum, tetapi dari kemampuan masyarakat memengaruhi keputusan, mengawasi pelaksanaan program, dan mengevaluasi hasil pembangunan.

4.5 Indikator Sosial-Ekonomi dan Keberlanjutan Pembangunan

Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok juga perlu dibaca melalui indikator sosial-ekonomi. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin menurun dari 7,31 persen pada 2024 menjadi 6,52 persen pada 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 72,29 menjadi 73,26, sedangkan Gini Ratio menurun dari 0,241 menjadi 0,219.

Gambar 3. Infografis Indikator Sosial-Ekonomi Kabupaten Solok (2024-2025)



Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok (2026).

Temuan tersebut menunjukkan adanya capaian positif dalam pembangunan sosial-ekonomi Kabupaten Solok. Namun, penurunan kemiskinan, peningkatan IPM, dan penurunan Gini Ratio tidak boleh dibaca hanya sebagai capaian administratif. Angka agregat dapat menyembunyikan ketimpangan antarwilayah, terutama apabila masih terdapat nagari atau kecamatan yang memiliki keterbatasan akses jalan, pelayanan dasar, dan peluang ekonomi. Karena itu, data pembangunan perlu digunakan secara kritis sebagai dasar intervensi kebijakan berbasis wilayah, bukan hanya sebagai indikator makro (Setyanto, 2025; Handini et al., 2025).

Dalam perspektif Foucault, kekuasaan tidak hanya membatasi tindakan manusia, tetapi juga membentuk posisi subjek dalam proses sosial dan politik (Villadsen, 2024). Oleh sebab itu, masyarakat tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek statistik dalam angka kemiskinan, IPM, dan Gini Ratio, tetapi sebagai subjek pembangunan yang berhak menyampaikan kebutuhan, mengontrol kebijakan, dan merasakan manfaat pembangunan secara adil.

Dengan demikian, data sosial-ekonomi Kabupaten Solok perlu dihubungkan dengan kondisi jalan serta peta kebutuhan nagari dan kecamatan. Penurunan kemiskinan, peningkatan IPM, dan penurunan Gini Ratio akan lebih bermakna apabila disertai pemerataan akses jalan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pasar, dan peluang ekonomi antarnagari. Penguatan partisipasi masyarakat dan komunikasi perencanaan juga penting agar indikator pembangunan terhubung dengan pengalaman warga di tingkat lokal (Mahlella, 2025; Yusri et al., 2025).

Tabel 1. Matriks Aktor dan Relasi Kekuasaan dalam Pembangunan Kabupaten Solok

Aktor	Sumber Kekuasaan	Kaitan dengan Data Kabupaten Solok	Potensi Masalah	Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan
Kepala Daerah	Otoritas politik dan administratif	Menentukan arah pembangunan pada wilayah luas 3.738 km ² dengan 14 kecamatan	Prioritas dapat dipengaruhi agenda politik jangka pendek	Perlu kepemimpinan berbasis data, pemerataan wilayah, dan keberlanjutan
DPRD	Fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan	Memiliki 35 anggota yang berperan dalam pembahasan prioritas anggaran pembangunan	Aspirasi politik dapat menggeser kebutuhan objektif wilayah	Perlu pengawasan substantif terhadap prioritas jalan dan pembangunan nagari
Bappeda	Kapasitas perencanaan teknokratik	Menghubungkan data wilayah, kemiskinan, IPM, Gini Ratio, dan kebutuhan infrastruktur	Data sektoral dapat tidak terintegrasi	Perlu perencanaan lintas sektor dan berbasis indikator keberlanjutan
Dinas PUPR	Kewenangan teknis infrastruktur	Berhadapan dengan total jalan 1.152,99 km dan jalan rusak berat 476,34 km	Keterbatasan anggaran dan tekanan prioritas politik	Perlu skala prioritas jalan berbasis kerusakan, konektivitas, dan keadilan wilayah
Pemerintah Nagari	Kewenangan lokal dan kedekatan dengan masyarakat	Terdapat 74 nagari dan 414 jorong sebagai basis kebutuhan lokal	Risiko dominasi elite lokal dan partisipasi formalitas	Perlu musyawarah nagari yang terbuka, inklusif, dan berbasis data kebutuhan warga
Masyarakat	Legitimasi sosial dan kontrol publik	Menjadi kelompok terdampak langsung oleh jalan rusak, akses layanan, dan kemiskinan	Keterbatasan akses informasi dan ruang pengaruh	Perlu penguatan partisipasi substantif dalam Musrenbang dan pengawasan pembangunan
Elite Lokal/Tokoh Adat	Pengaruh sosial, adat, dan jaringan lokal	Berpengaruh dalam pengambilan keputusan di tingkat nagari	Dapat memperkuat patronase lokal	Perlu musyawarah sebagai penghubung partisipasi, bukan pengendali keputusan
Pelaku Usaha	Modal ekonomi dan jaringan pasar	Berkepentingan terhadap konektivitas jalan dan akses ekonomi wilayah	Orientasi ekonomi dapat mengabaikan dampak sosial dan lingkungan	Perlu tata kelola investasi yang adil dan mendukung ekonomi lokal
OPD Sektoral	Kewenangan teknis program	Berperan dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan pelayanan dasar	Koordinasi lintas sektor lemah	Perlu integrasi program agar peningkatan IPM dan penurunan kemiskinan tidak terpisah dari pembangunan infrastruktur

Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa relasi kekuasaan dalam pembangunan Kabupaten Solok tidak berada pada satu aktor, tetapi tersebar dalam jaringan kewenangan, pengaruh, data, anggaran, dan legitimasi sosial. Kepala daerah dan DPRD berperan dalam menentukan arah kebijakan dan anggaran, sedangkan Bappeda dan Dinas PUPR memiliki kekuasaan teknokratis dan teknis dalam perencanaan serta penentuan prioritas pembangunan. Pemerintah nagari dan masyarakat memiliki kedekatan dengan kebutuhan lokal, tetapi posisinya dapat melemah apabila akses informasi dan pengambilan keputusan terbatas. Sementara itu, elite lokal dan pelaku usaha dapat menjadi mitra pembangunan sekaligus sumber dominasi apabila tidak dikontrol melalui transparansi dan akuntabilitas. Analisis relasi aktor menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan pengaturan kewenangan, koordinasi lintas sektor, dan kontrol publik yang kuat (Enala et al., 2025; Shabira et al., 2026).

Dengan demikian, matriks aktor tidak hanya menunjukkan pembagian peran, tetapi juga memperlihatkan perbedaan sumber kekuasaan. Kepala daerah memiliki otoritas politik, DPRD memiliki kekuasaan anggaran dan pengawasan, Bappeda memiliki kekuasaan teknokratik, Dinas PUPR memiliki kewenangan teknis, pemerintah nagari memiliki kedekatan sosial, masyarakat memiliki legitimasi partisipatif, elite lokal

memiliki pengaruh kultural, dan pelaku usaha memiliki sumber daya ekonomi. Perbedaan inilah yang menentukan bagaimana prioritas pembangunan dinegosiasikan.

4.6 Sintesis Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa relasi kekuasaan dalam pembangunan Kabupaten Solok bekerja melalui hubungan antara aktor formal, aktor lokal, dokumen perencanaan, data statistik, anggaran, dan forum partisipasi. Pemerintah daerah memiliki otoritas dalam menentukan arah pembangunan, DPRD berpengaruh dalam politik anggaran dan pengawasan, OPD memiliki kewenangan teknis, sedangkan nagari dan masyarakat menjadi ruang munculnya kebutuhan pembangunan. Studi tata kelola lingkungan, sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa relasi kuasa yang tidak dikontrol dapat memperkuat ketimpangan, sedangkan relasi yang terbuka dapat memperkuat akuntabilitas dan keberlanjutan (Daaris & Marwah, 2024; Sholikin, 2025; Kabuam, 2025).

Dalam model ini, infrastruktur jalan menjadi arena utama relasi kekuasaan karena berkaitan dengan distribusi akses antarwilayah. Data jalan rusak berat menunjukkan bahwa keberlanjutan pembangunan tidak cukup diukur dari adanya program, tetapi juga dari bagaimana prioritas ditentukan dan kepada siapa manfaat pembangunan diarahkan. Jika prioritas jalan tidak disusun secara transparan dan berbasis kebutuhan wilayah, pembangunan berisiko memperkuat ketimpangan spasial. Nagari menjadi arena kedua bekerjanya relasi kekuasaan. Sebagai unit pemerintahan lokal, nagari dekat dengan masyarakat, tetapi juga rentan terhadap dominasi elite lokal. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam musyawarah nagari dan Musrenbang perlu diperkuat agar pembangunan tidak hanya menjadi keputusan aktor formal, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan warga. Masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek yang ikut menentukan, mengawasi, dan mengevaluasi pembangunan.

Dengan demikian, tata kelola pembangunan Kabupaten Solok perlu diarahkan dari model dominatif menuju model kolaboratif-kritis. Model dominatif terjadi ketika prioritas pembangunan lebih banyak ditentukan oleh aktor yang memiliki akses terhadap anggaran, jaringan politik, dan kewenangan administratif. Sebaliknya, model kolaboratif-kritis menempatkan pemerintah daerah, DPRD, OPD, nagari, masyarakat, tokoh lokal,

dan pelaku usaha dalam hubungan yang saling mengontrol, berbasis data, transparan, dan berorientasi pada keadilan wilayah. Model ini sejalan dengan studi partisipasi publik dan *collaborative governance* yang menekankan pentingnya keterlibatan lintas aktor dalam pembangunan berkelanjutan (Kebubun, 2026; Sandrio et al., 2026).

Sintesis ini menegaskan bahwa relasi kekuasaan tidak selalu bermakna negatif. Kekuasaan menjadi problematis ketika berubah menjadi dominasi aktor tertentu, tertutupnya informasi, dan melemahnya partisipasi masyarakat. Namun, kekuasaan juga dapat diarahkan menjadi energi tata kelola apabila digunakan untuk membangun koordinasi, memperkuat akuntabilitas, membuka akses data, dan menjamin distribusi pembangunan yang lebih adil. Karena itu, agenda utama Kabupaten Solok bukan menghilangkan relasi kekuasaan, melainkan mengarahkannya untuk pemerataan dan keberlanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi kekuasaan berperan penting dalam penentuan prioritas infrastruktur jalan dan tata kelola nagari di Kabupaten Solok. Pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh dokumen perencanaan dan program teknis, tetapi juga oleh hubungan antaraktor, distribusi kewenangan, akses anggaran, kapasitas administratif, pengaruh politik, dan kualitas partisipasi masyarakat.

Temuan pertama menunjukkan bahwa infrastruktur jalan menjadi arena utama bekerjanya relasi kekuasaan. Data Kabupaten Solok memperlihatkan bahwa panjang jalan rusak berat lebih besar dibandingkan jalan dalam kondisi baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan bukan hanya persoalan teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), tetapi juga berkaitan dengan politik prioritas, alokasi anggaran, pengaruh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta kemampuan pemerintah nagari dan masyarakat dalam memperjuangkan kebutuhan wilayah.

Temuan kedua menunjukkan bahwa nagari merupakan ruang strategis sekaligus arena relasi kuasa dalam pembangunan daerah. Nagari berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan, menyusun prioritas, dan menyampaikan aspirasi pembangunan. Namun, nagari juga berpotensi menjadi arena dominasi elite lokal apabila musyawarah,

perencanaan, dan pengawasan hanya berlangsung secara formal. Karena itu, partisipasi masyarakat perlu diperkuat melalui akses informasi, ruang bicara, pengaruh terhadap keputusan, dan kemampuan mengawasi pelaksanaan pembangunan.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Solok membutuhkan tata kelola yang berbasis data, transparan, partisipatif, kolaboratif, dan berkeadilan wilayah. Pemerintah daerah perlu menyusun prioritas infrastruktur jalan berdasarkan kebutuhan objektif, tingkat kerusakan, dampak sosial-ekonomi, dan pemerataan konektivitas antarnagari. DPRD perlu menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan secara substantif. OPD perlu memperkuat koordinasi lintas sektor. Pemerintah nagari perlu memperluas ruang partisipasi warga. Masyarakat perlu ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai penerima program. Dengan demikian, relasi kekuasaan dapat diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas, pemerataan, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder dan telaah literatur, sehingga belum menggambarkan secara langsung persepsi, kepentingan, dan pengalaman para aktor pembangunan di Kabupaten Solok. Selain itu, penelitian ini belum melakukan analisis mendalam terhadap dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), wawancara aktor, serta pemetaan spasial kondisi infrastruktur. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara mendalam, survei masyarakat, analisis APBD, serta pemetaan spasial kondisi jalan agar hubungan antara relasi kekuasaan, distribusi anggaran, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan pembangunan daerah dapat dijelaskan secara lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Andreastuti, D., & Ayu, K. P. (2025). Adaptive co-management kearifan lokal dalam tata kelola lingkungan berkelanjutan di Kabupaten Gunung Mas. *Jurnal Masyarakat dan Desa*. <https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/JMD/article/view/730>
- Aasyah, N., Tsabitah, Z. H., et al. (2026). Power relations in mangrove ecosystem management: The authority of Kotawaringin village government amid environmental policy structures. *Journal of Social and Political Issues*. <https://doi.org/10.58835/jspi.v6i1.698>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok. (2026). *Kabupaten Solok dalam angka 2026*. BPS Kabupaten Solok. <https://solokkab.bps.go.id/id/publication/2026/02/27/3b82fc962bc6e6845206400e/solok-regency-in-figures-2026.html>
- Daaris, Y. Y., & Marwah. (2024). Sinergi kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya alam dalam pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 21(2), 14–28. <https://doi.org/10.59050/jian.v21i2.251>
- Dona, T. R., Mukhlis, M., & Budiono, P. (2025). Ketimpangan kekuasaan dalam konflik agraria: Menelaah resolusi konflik berbasis teori Foucault di Kabupaten Tebo. *Journal Publicuho*, 8(1), 371–384. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i1.605>
- Enala, S. H., Jalal, N., & Adam, A. F. (2025). Analisis peran dan kewenangan aktor administrasi publik dalam proyek pangan nasional di Papua Selatan: Perspektif multi-level governance. *Musamus Journal of Public Administration*. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v7i2.7116>
- Handini, N., Darwina, M., et al. (2025). Peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Nusantara*. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5793>
- Harahap, F. R. (2026). Praktik governmentality dalam skema hutan tanaman energi (HTE) pada Suku Jerieng di Kabupaten Bangka Barat. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/976>
- Jaya, M., Epriadi, D., & Sari, M. D. K. (2025). Implementasi program Dumisake dan dinamika politik pembangunan daerah: Studi kebijakan UMKM di Kecamatan Rimbo Bujang. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*. <https://doi.org/10.36355/jppd.v7i1.233>
- Kabuam, W. (2025). Tata kelola perbatasan yang berkelanjutan: Sinergi lintas sektor untuk pembangunan dan keamanan di Merauke. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. <https://doi.org/10.63822/wgcp4m13>
- Kebubun, R. J. M. (2026). Partisipasi masyarakat dalam tata kelola ketahanan pangan daerah perbatasan: Model collaborative governance di Kabupaten Merauke. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. <https://doi.org/10.63822/wgnsq286>
- Lazar, F. C. T., Tokan, F. B., & Niron, E. S. (2024). Relasi kuasa pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Lamabelawa. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 8(2), 219–239. <https://doi.org/10.38043/jids.v8i2.5345>
- Lubis, E. F., Yuliani, F., & Marta, A. (2025). Dimensi policy network dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan XIII Koto Kampar, Provinsi

- Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
<https://doi.org/10.25299/jiap.2025.23810>
- Mahlella, N. (2025). Strategi penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik*.
<https://publikasi.nexusjurnal.com/index.php/japu/article/download/26/27>
- Maulana, R., Warganegara, A., et al. (2025). Dinamika hubungan politik antaraktor dalam pengelolaan dana desa: Studi perbandingan kinerja keuangan desa. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i9.2025.3644-3658>
- Pantola, B. R. S., Ola, U., & Boro, V. I. A. (2025). Dominasi supradesa dalam pembangunan desa: Implementasi asas subsidiaritas di Desa Oelnunuh. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
<https://doi.org/10.52423/neores.v6i2.1123>
- Sahetapy, F., Sabaat, Y. Y., & Lopo, Y. H. L. (2026). Politik tata ruang dalam proyek strategis nasional: Studi kasus proyek pembangunan Rempang Eco-City Pulau Rempang, Batam. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*.
<https://pchukumsosial.org/index.php/pchs/article/view/231>
- Sandrio, L., Rudiyanto, R., Seran, M. Y., et al. (2026). Beyond policy rhetoric: Tata kelola pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat di Desa Wae Lolos. *Journal of Science Education and Management Business*. <https://rcf-indonesia.org/home/index.php/JOSEAMB/article/view/1000>
- Setyanto, W. (2025). Data tunggal sosial ekonomi, penurunan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan: Pengalaman Indonesia. *KRITIS*.
<https://doi.org/10.24246/kritis.v34i1p266-284>
- Shabira, L., Muhtadi, T. B. Y., et al. (2026). Analisis relasi kekuasaan dan kesenjangan kewenangan antar stakeholder dalam pengelolaan sampah di TPA Cipeucang Kota Tangerang Selatan. *Publicness: Journal of Public Administration Studies*.
<https://doi.org/10.24036/publicness.v5i1.324>
- Sholikin, A. (2025). Politik tata kelola sumber daya alam di era reformasi: Jejaring elite, konflik kepentingan, dan ketimpangan ekologis. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*. <https://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/12667>
- Sutisna, A., Wulansari, R. D., & Furqon, W. (2026). Desa sebagai subyek pembangunan: Studi desentralisasi, kelembagaan, dan partisipasi warga. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.25157/moderat.v12i1.5745>
- Syahadi, A. F., & Makhya, S. (2026). Analisis kebijakan pembangunan jalan provinsi dalam meningkatkan konektivitas wilayah di Provinsi Lampung. *Journal Publicuho*.
<https://doi.org/10.35817/publicuho.v9i2.1119>
- Villadsen, K. (2024). The subject and power—Four decades later: Tracing Foucault's evolving concept of subjectivation. *Foucault Studies*, 36, 293–321.
<https://doi.org/10.22439/fs.i36.7220>
- Yusri, N., Wardi, Y., & Evanita, S. (2025). Komunikasi dalam perencanaan pembangunan: Suatu kajian kritis dalam kebijakan lingkungan dan partisipasi publik. *Jurnal Salingka Nagari*. <https://doi.org/10.24036/jsn.v4i1.319>

Zahwa, B. A. A., & Sari, P. I. (2025). Analisis politik ekonomi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. *Jurnal Media Akademik*.
<https://doi.org/10.62281/1t6kxj58>